

Katalog: 3102017.36

ISSN 2715-1492

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI BANTEN 2023

Volume 9, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN**

Katalog: 3102017.36

ISSN 2715-1492

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI BANTEN 2023

Volume 9, 2024

<https://banten.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN**

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI BANTEN 2023

Volume 9, 2024

Katalog	: 3102017.36
ISSN	: 2715-1492
Nomor Publikasi	: 36000.24026
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	: xiv+84 halaman
Penyusun Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Pembuat Kover	: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Penerbit	: ©BPS Provinsi Banten
Sumber Ilustrasi	: www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Tim Penyusun

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI BANTEN 2023

Volume 9, 2024

Pengarah

Faizal Anwar

Penanggung Jawab

Awang Pramila

Penyunting

Awang Pramila

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Dinda Larasati

Sa'diah

Penata Letak

Dinda Larasati

Sa'diah

Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah, Tuhan Semesta Alam, atas terbitnya publikasi **Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2023**. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG merupakan indikator pembangunan manusia berbasis gender, yang dilihat dari tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Publikasi IPG ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan capaian pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Banten. Sebagai pelengkap, diinformasikan pula tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan perempuannya.

Diharapkan publikasi IPG ini dapat menjadi bahan yang memperkaya literatur, sekaligus alat evaluasi pembangunan gender di Banten. Akhirnya, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran, sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Kota Serang, Juli 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten



Faizal Anwar

Daftar Isi

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BANTEN 2023

Volume 9, 2024

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	xi
Penjelasan Umum	xiii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Larangan Diskriminasi Terhadap Perempuan.....	4
1.3 SDGs dan Kesetaraan Gender	4
1.4 RPJMN dan Kesetaraan Gender	6
1.5 RPJMD dan Kesetaraan Gender	11
Bab 2 Metodologi IPG.....	13
2.1 Penghitungan IPG	15
2.2 Penghitungan IDG	20
2.3 Penghitungan IKG	23
Bab 3 Gambaran Umum Pembangunan Gender.....	27
3.1 Komposisi Penduduk.....	29
3.2 Kesehatan	30
3.3 Pendidikan	33
3.4 Standar Hidup Layak	36
3.5 Ketenagakerjaan	37
3.6 Kesempatan dalam Bidang Politik.....	40

Bab 4	Capaian Keberhasilan Pembangunan Gender	41
4.1	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	44
4.2	Perkembangan Capaian Pembangunan Gender	45
4.3	Perkembangan Capaian Pemberdayaan Gender.....	46
4.4	Perkembangan Capaian Kesenjangan Gender.....	48
4.5	Capaian Pembangunan Gender Kabupaten/Kota.....	49
4.6	Tipologi Klassen IPM, IPG, IDG dan IKG Kabupaten/Kota.....	52
Bab 5	Kesimpulan.....	57
Daftar Pustaka	61
Lampiran	63

<https://banten.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	5
Gambar 1.2 Visi dan Misi Presiden, 2020–2024	7
Gambar 1.3 Visi Misi dan Arah Presiden 2020–2024 serta Agenda Perubahan RPJMN 2020–2024	9
Gambar 3.1 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Provinsi Banten, 2023.....	30
Gambar 3.2 Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (tahun), 2020–2023.....	31
Gambar 3.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (tahun), 2014–2023	34
Gambar 3.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Banten, 2023.....	34
Gambar 3.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Banten (persen), 2023	35
Gambar 3.6 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (tahun), 2014–2023.....	36
Gambar 3.7 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (ribu rupiah), 2014–2023	36
Gambar 3.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (persen), 2020–2023.....	38
Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Banten (persen), 2023	38
Gambar 4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, 2020–2023	45
Gambar 4.2 Perkembangan Kecepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten (persen), 2021–2023.....	46

Gambar 4.3	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Banten, 2020–2023	47
Gambar 4.4	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Banten, 2020–2023	48
Gambar 4.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023	49
Gambar 4.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023	50
Gambar 4.7	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023	51
Gambar 4.8	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023	51
Gambar 4.9	Tipologi Klassen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2023.....	53
Gambar 4.10	Tipologi Klassen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2023.....	54
Gambar 4.11	Tipologi Klassen Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2023.....	55

Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Komponen di Provinsi Banten, 2020–2023 65
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten, 2020–2023 68
Lampiran 3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020–2023 69
Lampiran 4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Komponen di Provinsi Banten, 2020–2023 74
Lampiran 5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten, 2020–2023 75
Lampiran 6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020–2023 76
Lampiran 7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Komponen di Provinsi Banten, 2020–2023 77
Lampiran 8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten, 2020–2023 80
Lampiran 9	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020–2023 81

Penjelasan Umum

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

Data tidak tersedia	: ...
Tidak ada atau nol	: -
Data dapat diabaikan	: ~0
Tanda desimal	: ,
Data tidak dapat ditampilkan	: NA
Angka estimasi	: e
Angka diperbaiki	: r
Angka sementara	: *
Angka sangat sementara	: **
Angka sangat sangat sementara	: ***

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

BAB 1

Pendahuluan



Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gender secara umum diartikan bukan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep gender adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya, peran kaum perempuan juga dapat terlihat dari peran reproduksi, peran produktif, dan peran sosial kemasyarakatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, isu-isu terkait gender cukup menarik perhatian terutama pada masalah diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Diskriminasi terjadi dari berbagai aspek kehidupan yaitu berupa perilaku masyarakat yang berasal dari suatu aturan, sejarah, adat, norma, dan struktur masyarakat. Diskriminasi gender akan melahirkan kesenjangan gender, yang akan menghilangkan hak-hak perempuan atas kesempatan dan kendali pada sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik.

Sebagai pihak yang melahirkan dan mendidik generasi penerus, perempuan harus dilindungi hak-hak hidupnya. Bentuk perlindungan hak-hak tersebut adalah menerima perlakuan yang adil terhadap aspek-aspek dasar manusia, yaitu dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang melahirkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi sangat mutlak.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah satunya adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP).

1.2 Larangan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Permasalahan-permasalahan terkait gender yang dihadapi oleh perempuan, menjadi perhatian dari berbagai lembaga internasional dan pemerintah seluruh negara, termasuk Indonesia. Perhatian ini merupakan wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai bidang.

Keprihatinan lembaga internasional dan negara-negara di dunia diwujudkan dalam bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1967, telah mengeluarkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi tersebut berisi hak dan kewajiban wanita, berdasarkan persamaan hak wanita dengan pria, dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, deklarasi tersebut oleh Komisi PBB untuk Kedudukan Perempuan disusun menjadi suatu rancangan konvensi. Rancangan konvensi ini pada tahun 1979 diadopsi oleh Majelis Umum PBB menjadi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*).

Isi Konvensi CEDAW ini ternyata sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, Indonesia ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dengan meratifikasinya dalam bentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

1.3 SDGs dan Kesetaraan Gender

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs, the 2030 Agenda for Sustainable Development*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong terjadinya perubahan ke arah ke pembangunan berkelanjutan, yang berdasarkan hak asasi

manusia dan kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) disahkan dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yang akan membimbing setiap agenda dan kebijakan politik negara-negara anggota PBB selama 15 tahun ke depan. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan (*"No one is Left Behind"*) atau dengan slogan baru, jangan tinggalkan siapapun di belakang (*"Leave no one behind"*).



Gambar 1.1
Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
(SDGs)

Sumber: sdgs.bappenas.go.id

SDGs terdiri dari 17 tujuan (*goals*), yang terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator. Salah satu tujuan SDGs, yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Adapun sasaran globalnya, adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

- 
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
 5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil ulasan dari konferensi-konferensi tersebut.

1.4 RPJMN dan Kesetaraan Gender

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga pelaksanaannya menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*), yang memang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 memiliki visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini merupakan visi Presiden periode 2020-2024, yang disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua (Gambar 1.2).



Gambar 1.2
Visi dan Misi
Presiden
2020–2024

Sumber: Narasi RPJM 2020-2024 www.bappenas.go.id

RPJMN 2020-2024, sesungguhnya merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama, guna pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Selain visi dan misi, Presiden periode 2020-2024 juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Implikasinya, pencapaian Visi Indonesia 2045 dilakukan melalui transformasi ekonomi, yang didukung oleh hilirisasi industri, dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Adapun kelima arah Presiden ini, secara lengkap adalah sebagai berikut :

Pembangunan SDM. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Pembangunan Infrastruktur. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Penyederhanaan Regulasi. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama dengan menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Penyederhanaan Birokrasi. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

Transformasi Ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memperhatikan alur pemikiran di atas, terlihat bahwa RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Untuk mencapai tujuan utama dari RPJMN 2020-2024, ketiga landasan utama tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3
Visi Misi dan
Arahan Presiden
2020–2024
serta
Agenda
Perubahan RPJMN
2020–2024

Sumber: Narasi RPJM 2020–2024 www.bappenas.go.id

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.



Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Keenam pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender.
2. Tata Kelola Pemerintah yang Baik.
3. Pembangunan Berkelanjutan.
4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.
5. Modal Sosial dan Budaya.
6. Transformasi Digital.

Berarti, kesetaraan gender menjadi salah satu katalis dalam pembangunan nasional, setidaknya sampai tahun 2024. Adapun maksud dari pengarusutamaan gender (PUG) dalam RPJMN 2020-2024 adalah strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sasaran pengarusutamaan gender dalam RPJMN 2020-2024 adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masing-masing dari 90,99 dan 72,10 pada tahun 2018 menjadi 92,75 dan 75,59 pada tahun 2024.

Sementara arahnya untuk mewujudkan kesejahteraan gender di berbagai bidang, melalui:

1. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup:
 - a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan,

- 
- 
- b. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender,
 - c. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan,
 - d. Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG,
 - e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah,
 - f. Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan.
2. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup:
- a. Peningkatan pemberdayaan perempuan,
 - b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki kontrol terhadap pembangunan.

1.5 RPJMD dan Kesetaraan Gender

Visi Provinsi Banten ini merujuk pada kerangka pemahaman RPJPN 2005-2025 dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2005-2025, serta mengakselerasikannya dengan RPJMN 2020-2024.

Selain itu, penyusunan visinya juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis serta kearifan lokal yang menjunjung tinggi iman dan taqwa dalam implementasinya dengan akhlaq karimah.

Oleh sebab itu, Visi Pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai selama tahun 2023-2026 adalah Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa. Visi Provinsi Banten ini, kemudian akan diwujudkan melalui empat misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;

- 
- 
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Sementara kesetaraan gender, secara khusus disebutkan dalam agenda pertama dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Sasarannya adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender. Adapun strategi yang dipilih adalah dengan meningkatkan kesetaraan gender dengan arah kebijakan pelebagaan pengarusutamaan gender pada semua sektor, serta meningkatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan arah kebijakan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.



<https://banten.bps.go.id>

BAB 2

Metodologi IPG

1



Umur Panjang dan Hidup Sehat

Indikator yang Digunakan:
Umur Harapan Hidup (tahun)

Pengetahuan

Indikator yang Digunakan:
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)



2

3



Standar Hidup Layak

Indikator yang Digunakan:
Pengeluaran Perkapita yang
Disesuaikan (rupiah setahun)

DIMENSI PEMBENTUK INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Bab 2 Metodologi IPG

2.1 Penghitungan IPG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) pada tahun 1995, lima tahun setelah diperkenalkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada saat itu, metode penghitungannya tidaklah dengan mengukur langsung ketimpangan antar gender, melainkan hanya mengukur disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG yang dihasilkannya juga tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Metodologi penghitungan IPG yang demikian itu, terus dipertahankan oleh UNDP hingga tahun 2009. Sampai kemudian UNDP menghentikan penghitungan IPG pada tahun 2010 hingga 2013.

Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG, namun dengan menggunakan metode yang baru. Perubahan metode IPG ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian, dengan perubahan yang terjadi pada metodologi penghitungan IPM.

Berbeda dengan metode sebelumnya, IPG metode baru merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini mulai diperkenalkan IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan rasio antara keduanya. Implikasinya, perbedaan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki terlihat jelas.

Penghitungan IPG Metode Baru

Mulai tahun 2014, penghitungan IPG mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan, baik terhadap indikator yang digunakan maupun juga metodologi penghitungannya.



Namun dimensi yang digunakan masih tetap sama dengan metode sebelumnya, yaitu :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Sementara dari sisi indikator, selain dimensi umur panjang dan hidup sehat yang masih menggunakan umur harapan hidup, UNDP mengganti beberapa indikator untuk penyempurnaan metodologi. Pada dimensi pengetahuan, digunakan indikator pendidikan berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak, menggunakan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.

Semua perubahan yang dilakukan UNDP diakomodir oleh BPS. Tercatat, dimensi umur panjang dan hidup sehat, diukur dengan menggunakan umur harapan hidup saat lahir yang diperoleh dari hasil *Long Form Sensus Penduduk 2020* (LF SP2020). Sementara pengukuran dimensi pengetahuan, dilakukan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun dan angka rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas, yang didapatkan dari data Susenas.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak, BPS tidak dapat menggunakan PNB per kapita, karena faktor ketidaktersediaan data PNB per kapita hingga level kabupaten/kota. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan atau proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang didapatkan dari Susenas.

Pada prinsipnya, keseluruhan indikator langsung dihitung menurut jenis kelamin. Hanya saja pada dimensi standar hidup layak, dibutuhkan beberapa data lain guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita penduduk laki-laki dan perempuan. Data yang digunakan adalah data upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Secara umum, indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut ini adalah nilai maksimum dan minimum masing-masing komponen:

Tabel 2.1

Batas Minimum dan Maksimum Indikator Pembentuk Dimensi Indeks Pembangua Gender (IPG)	Tahun		Minimum		Maksimum	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Umur	Umur Harapan Hidup (tahun)	17,5	22,5	82,5	87,5
	Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	-	-	18	18
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	-	-	15	15
Standar Hidup Layak		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (rupiah setahun)	1.007.436		26.572.352	

Sumber: Badan Pusat Statistik,

Penyusunan indeks untuk indikator dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat (indeks kesehatan) dan dimensi pengetahuan (indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah), menggunakan rumus:

$$\text{Indeks } X_i = \frac{(X_i - X_{(i-\text{min})})}{(X_{(i-\text{maks})} - X_{(i-\text{min})})}$$

Dimana :

X_i = Nilai komponen IPM ke-i

$X_{(i-\text{min})}$ = Nilai minimum komponen IPM ke-i

$X_{(i-\text{maks})}$ = Nilai maksimum komponen IPM ke-i

Sementara rumus yang digunakan untuk penghitungan indeks dalam dimensi standar hidup layak (indeks pendapatan) adalah :

$$\text{Indeks } Y = \frac{[\text{Ln}(y) - \text{Ln}(y_{\min})]}{[\text{Ln}(y_{\text{maks}}) - \text{Ln}(y_{\min})]}$$

Dimana :

- y = Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
- y_{\min} = Nilai minimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
- y_{maks} = Nilai maksimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan

Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan penghitungan indeks pendidikan. Penghitungan indeks pendidikan sendiri menggunakan rata-rata aritmatik, yaitu:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$$

Dimana :

- Indeks HSL = Indeks harapan lama sekolah
- Indeks RLS = Indeks rata-rata lamasekolah

Adapun metode agregasi yang ditempuh guna mendapatkan angka IPM laki-laki (IPM_L) dan perempuan (IPM_p) sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi tersebut adalah rata-rata geometrik, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM_L = \sqrt[3]{\text{Indeks AHH}_L \times \text{Indeks Pengetahuan}_L \times \text{Indeks Pendapatan}_L}$$

$$IPM_p = \sqrt[3]{\text{Indeks AHH}_p \times \text{Indeks Pengetahuan}_p \times \text{Indeks Pendapatan}_p}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini menjadi sangat beralasan, karena cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antar dimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antar dimensi.

Sementara penghitungan angka IPG nya pada metode baru, tidak lagi dilakukan dengan membandingkannya terhadap angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Perubahan Interpretasi

Akibat berubahnya metodologi penghitungan, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin rendah ketimpangan kapabilitas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak lagi perlu dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jaraknya dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan.

UHH Hasil Long Form SP2020

Mulai tahun 2023, Badan Pusat Statistik melakukan penghitungan indikator umur harapan hidup (UHH) dengan menggunakan data hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Dengan demikian, angka IPG yang dihasilkan adalah IPG (UHH LF SP2020) series tahun 2020–2023. Sementara itu, IPG yang menggunakan UHH hasil proyeksi SP2010 (IPG (UHH SP2010)) masih dihitung dengan tujuan untuk meneruskan series tahun yang sudah ada sebelumnya (2010–2023).

2.2 Penghitungan IDG

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

Indeks Keterwakilan Parlemen (I_{par})

$$EDEP_{(par)} = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

$$I_{(par)} = \frac{\{EDEP_{(par)}\}}{50}$$

Dimana :

P_f = Proporsi penduduk perempuan

P_m = Proporsi penduduk laki-laki

X_f = Proporsi keterwakilan perempuan di Parlemen

X_m = Proporsi keterwakilan laki-laki di Parlemen

Indeks Pengambilan Keputusan (I_{DM})

$$EDEP_{(DM)} = \left(\frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1} \times 100$$

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

Dimana :

P_f = Proporsi penduduk perempuan

P_m = Proporsi penduduk laki-laki

Y_f = Proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_m = Proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

Indeks Distribusi Pendapatan ($I_{Inc-dis}$)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran per kapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran per kapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

Komponen	Satuan	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	a. 300.000 (1996)	732.720
		b. 360.000 (1999, dst)	

Sebelumnya harus dihitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari:

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_i}{\text{Upah buruh nonpertanian}_m}$$

$$\text{Rata-rata Upah}_i = (\text{Rasio Upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) + (\text{Rasio Upah}_f \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f)$$

$$\text{Rasio terhadap Rata-rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata-rata Upah}_m}$$

$$\text{Sumbangan Pendapatan}_i = \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \times \text{Rasio terhadap Rata-rata Upah}_i$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

Dimana :

i = Laki-laki (m) atau Perempuan (f)

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right)^{-1} \times 100$$

$$I_{(inc-dis)} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

Dimana :

P_f = Proporsi penduduk perempuan

P_m = Proporsi penduduk laki-laki

Z_f = Proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = Proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

$$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$$

2.3 Penghitungan IKG

Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengadopsi penghitungan *Gender Inequality Index* (GII) dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan beberapa penyesuaian. Indikator *Maternal Mortality Rate* (MMR) atau Angka Kematian Ibu (AKI) yang tidak tersedia secara kontinu setiap tahun didekati dengan indikator proporsi perempuan 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF). Penggunaan indikator MTF sebagai proksi didasari oleh pertimbangan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan indikator AKI dan tersedia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara rutin setiap tahun. Di samping itu, persalinan di fasilitas kesehatan dapat menekan risiko kematian ibu dalam melahirkan sehingga diharapkan dapat menggambarkan capaian AKI.

Untuk indikator *Adolescent Birth Rate* (ABR) yang digunakan oleh UNDP dalam penghitungan GII didekati dengan indikator proporsi perempuan berusia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Penggunaan indikator MHPK20 sebagai proksi didasari oleh pertimbangan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan indikator ABR dan tersedia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara rutin setiap tahun.

Sementara itu, 3 (tiga) indikator lainnya sama dengan yang digunakan oleh UNDP dalam menyusun GII, yaitu persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas, persentase anggota legislatif, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF dan MHPK20, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif, dan dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator TPAK. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.

Langkah-langkah penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki

$$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK\ 20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$

$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$$

2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik

$$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$$

3. Menghitung indeks dimensi

$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK\ 20}} + 1 \right)}{2}$$

$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$

$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$$

4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik

$$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$

5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender

$$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$

6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

$$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$

Keterangan

G_p	: Indeks Perempuan
G_L	: Indeks Laki-laki
MTF	: Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan
MHPK20	: Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun
PR_p	: Persentase perempuan di legislatif
PR_L	: Persentase laki-laki di legislatif
SE_p	: Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
SE_L	: Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
$TPAK_p$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja
$TPAK_L$: Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja
$HARM(G_p, G_L)$: Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik
IKR	: Indeks dimensi kesehatan reproduksi
IP	: Indeks dimensi pemberdayaan
IPK	: Indeks dimensi pasar tenaga kerja
$G_{p,L}$: Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik
IKG	: Indeks Ketimpangan Gender

BAB 3 Gambaran Umum Pembangunan Gender

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI BANTEN 2023¹

¹ Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035

PEREMPUAN

6.045,01
ribu jiwa

LAKI-LAKI

6.262,73
ribu jiwa

Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Banten pada tahun 2023 yaitu sebesar **103,6**, artinya terdapat **103 sampai 104 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.**



Agustus 2023

7,10

8,28

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan hasil **Sakernas 2023**, pasokan tenaga kerja perempuan lebih banyak yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dibandingkan tenaga kerja laki-laki.

Laki-laki

Perempuan

Usia Harapan Hidup (tahun)

72,16

77,51

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

9,49

8,85

Harapan Lama Sekolah (tahun)

12,93

13,27

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah)

18.032

10.785

Bab 3 **Gambaran Umum Pembangunan Gender**

Gender, bukan diartikan sebagai perbedaan menurut kondisi fisik atau jenis kelamin. Namun, gender lebih dimaknai sebagai adanya perbedaan peran, fungsi, perilaku, kegiatan, serta atribut antara laki-laki dan perempuan. Segala jenis perbedaan ini muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan terjadi karena memang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat itu sendiri.

Ideologi gender yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini, telah menentukan bahwa urusan rumah tangga atau ranah domestik adalah dunianya perempuan. Sementara ranah publik, terutama yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan, menjadi urusan laki-laki.

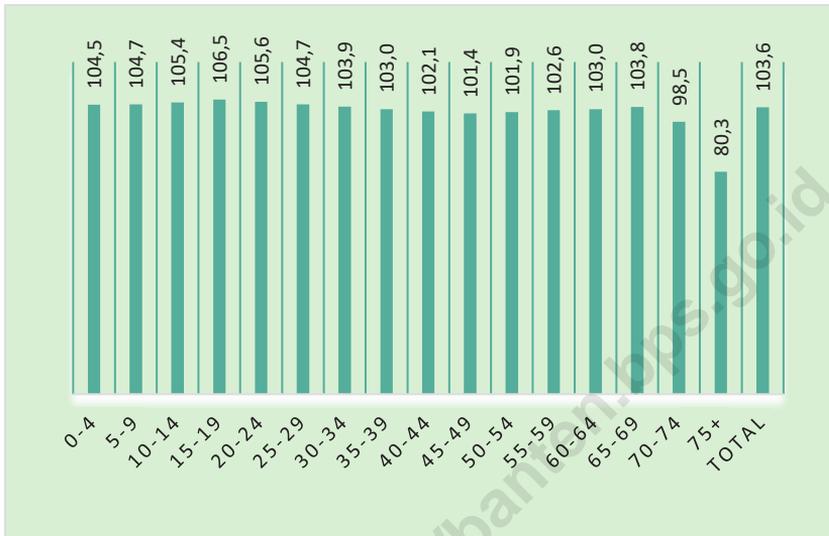
Dikotomi peran yang demikian inilah, yang kemudian diiringi dengan munculnya budaya patriarki, menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya diskriminasi gender atau perbedaan perlakuan terhadap perempuan. Akibatnya dalam berbagai bidang pembangunan, capaian perempuan kebanyakan lebih tertinggal dari laki-laki.

Untuk mengetahui bagaimana capaian perempuan dalam pembangunan, perlu diawali dengan menampilkan gambaran umum mengenai perbedaan gender. Gambaran umum ini, difokuskan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan perlakuan terhadap perempuan, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

3.1 Komposisi Penduduk

Salah satu komponen dalam sasaran pembangunan adalah penduduk. Data kependudukan diperlukan untuk pengambilan kebijakan bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Menurut Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Provinsi Banten pada tahun 2023 adalah sebanyak 12.307,73 ribu jiwa dengan jumlah

penduduk penduduk laki-laki sebanyak 6.262,73 ribu jiwa (50,9 persen) dan jumlah perempuan sebanyak 6.045,01 ribu jiwa (49,12 persen). Berdasarkan informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Banten adalah sebesar 103,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding dengan penduduk perempuan.



Gambar 3.1

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Provinsi Banten, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Rasio jenis kelamin pada usia dibawah 70 tahun bernilai diatas 100. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki dari usia 0 sampai dengan 69 lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan dalam rentang usia yang sama. Sedangkan jumlah laki-laki usia 70 tahun ke atas bernilai kurang dari 100, yang mengindikasikan jumlah laki-laki pada usia tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan pada usia yang sama.

3.2 Kesehatan

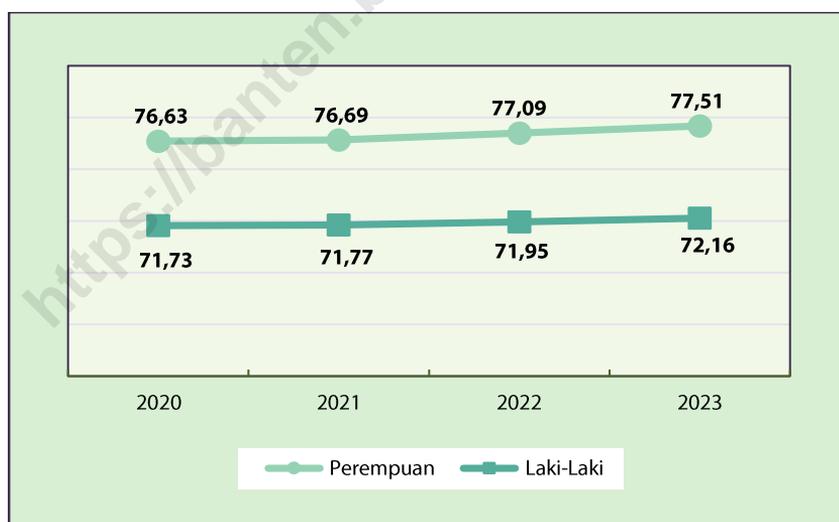
Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang disebutkan dalam Deklarasi HAM PBB tertanggal 10 Desember 1948. Dalam deklarasi HAM tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Selain itu, Konvensi International tentang Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan PBB pada tahun 1966, juga mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mentalnya.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia. Oleh sebab itu, sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.

Wujud dari pemenuhan hak-hak asasi kesehatan adalah pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat. Caranya adalah dengan menyediakan sarana kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status ekonomi dan sosial, termasuk gender sekalipun.

Gambar 3.2
Umur Harapan
Hidup (UHH)
Menurut
Jenis Kelamin
di Provinsi Banten
(tahun),
2020–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2020 Long Form

Pemenuhan hak atas kesehatan oleh pemerintah bagi penduduk Banten sudah relatif baik. Tentunya kesehatan penduduk yang baik memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata tahun hidup penduduk. Indikator Umur harapan hidup (UHH) penduduk perempuan dan laki-laki selama periode 2020-2023 menunjukkan tren positif (Gambar 3.2). Selama periode tersebut, besarnya selisih antara UHH perempuan dan laki-laki sekitar lima tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan secara rata-rata akan hidup lima tahun lebih lama dibandingkan laki-laki.



Lebih lamanya rata-rata hidup penduduk perempuan, merupakan fenomena umum yang terjadi di berbagai negara. Namun terjadinya bukan karena diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Fenomena ini, menurut *Centers For Disease Control and Prevention* (www.cdc.gov) dalam 5 Alasan Wanita Lebih Panjang Umur Dibanding Pria (Hanna, 2014), disebabkan oleh : Pertama, wanita lebih kuat dalam kandungan. Dalam arti, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan. Selain itu, sebelum dilahirkan perkembangan fisik laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan. Kondisi inilah yang menjadi penyebab mengapa laki-laki lebih berisiko meninggal jika lahir prematur.

Kedua, wanita penuh perhitungan. Lobus frontal otak merupakan bagian dari otak yang berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko perhitungan. Lobus frontal ini pada wanita berkembang lebih cepat, sehingga mereka tidak mudah terkena cedera yang tak disengaja. Sebaliknya, cedera tersebut bukan hanya seringkali menimpa laki-laki, bahkan menjadi penyebab utama ketiga bagi kematiannya.

Ketiga, wanita lebih kuat menghadapi penyakit jantung. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pernah merilis bahwa penyakit jantung menjadi pembunuh nomor satu bagi laki-laki maupun perempuan. Sayangnya, kecenderungan perkembangan penyakit ini dan risiko meninggal paling cepat pada usia 30-an dan 40-an, justru dimiliki oleh pria. Sementara pada wanita, perkembangannya membutuhkan waktu 10 tahun lebih lama. Kondisi yang demikian dapat terjadi karena wanita memiliki hormon estrogen yang membuat arteri mereka menjadi lebih kuat dan fleksibel.



Keempat, sifat sosial wanita lebih kuat. Berdasarkan penelitian pada 2010 di Brigham Young University, kebiasaan seorang wanita untuk mengungkapkan kekhawatiran melalui curhat atau berbicara kepada orang lain, ternyata dapat mengurangi risiko meninggal hingga 50 persen. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa tingkat harapan hidup wanita lebih tinggi dari pria.

Kelima, wanita lebih menjaga kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih memperhatikan kondisi kesehatan dibandingkan pria. Persentasenya, pria 24 persen lebih sedikit mengunjungi dokter dalam setahun dibandingkan wanita. Selain

itu, menurut *Agency for Healthcare Research and Quality*, sekitar 22 persen pria melewatkan pengujian kolesterol. Sementara hasil survei yang dikutip dari *Kaiser Family Foundation* menunjukkan, lebih dari 28 persen pria tidak memiliki dokter reguler.

3.3 Pendidikan

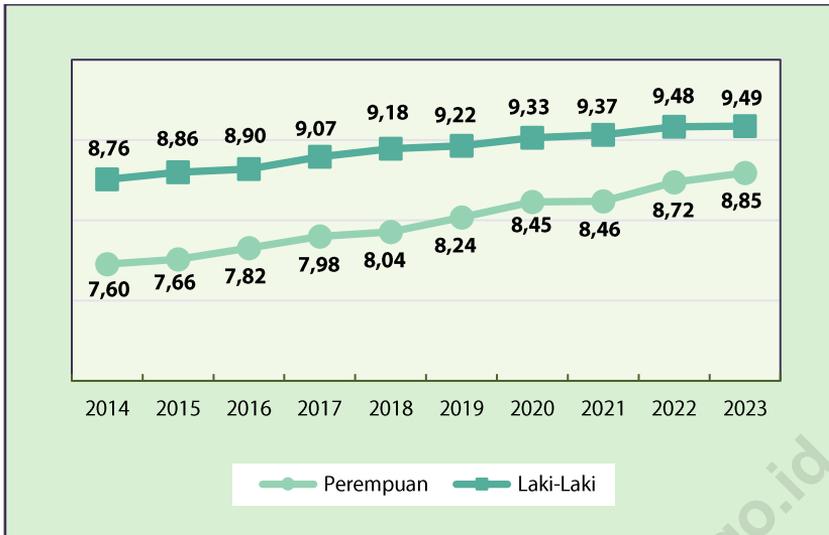
Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Bahkan, ia merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Di sisi lain, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini karena melalui pendidikan, manusia dapat terus-menerus mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemampuan mengembangkan diri inilah yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan demikian, terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik itu hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik. Oleh karena itu, pemerintah wajib membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk bersekolah, terlepas dari apapun latar belakang status ekonomi dan sosial mereka.

Pemenuhan hak atas pendidikan di Banten sudah mulai setara. Selama tahun 2023, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan semakin meningkat (Gambar 3.3). Terlihat, angka rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 9,49 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA, sedangkan untuk perempuan memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,85 tahun atau setara dengan kelas 2 sampai 3 SMP.

Secara umum selama tahun 2023, perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan yang mengecil. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang.

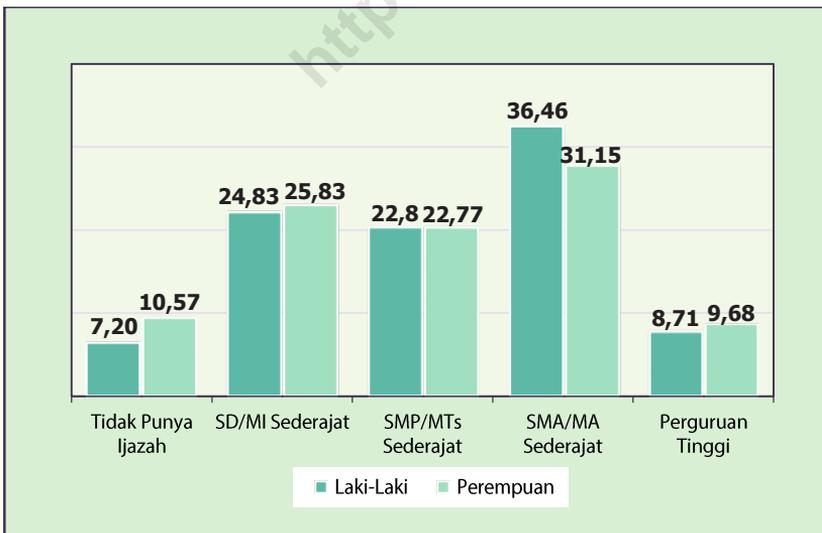


Gambar 3.3

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (tahun), 2014–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bila diperhatikan menurut data komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan (Gambar 3.4). Tampak bahwa kaum perempuan lebih banyak yang memiliki ijazah perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Banten yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dibandingkan perempuan sudah mulai memudar.



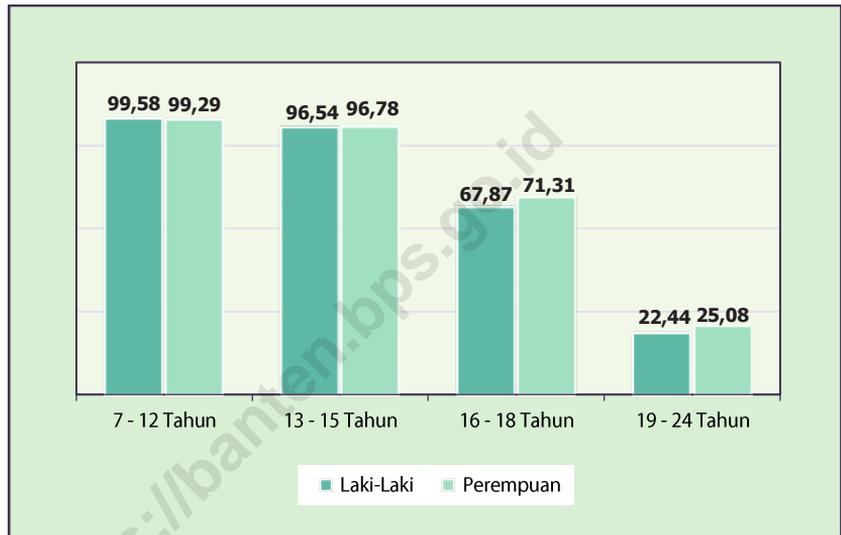
Gambar 3.4

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Banten, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Seiring dengan perkembangan jaman, keberadaan budaya patrilineal di tengah masyarakat cenderung memudar. Perempuan saat ini memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh data Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk perempuan tahun 2023, dimana APS kelompok usia 16-18 tahun dan usia 19-24 tahun penduduk perempuan, yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar 3.5).

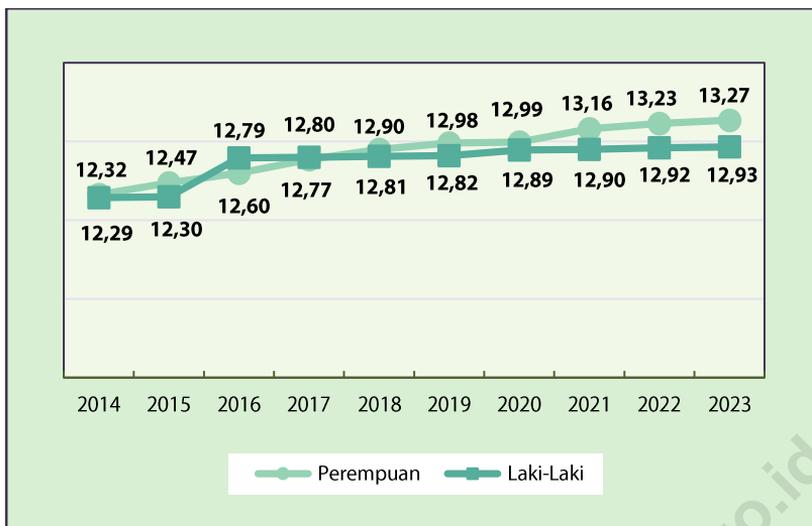
Gambar 3.5
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Banten (persen), 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kecenderungan memudarnya budaya paternalistik ini, akan semakin terkonfirmasi bila ditinjau dari indikator harapan lama sekolah (HLS). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh di masa-masa mendatang oleh penduduk berusia 7 tahun. Berdasarkan Gambar 3.6, nilai HLS perempuan di Banten terus mengalami peningkatan. Selama 10 tahun terakhir, HLS perempuan selalu berada di atas laki-laki, kecuali di tahun 2016, HLS perempuan lebih rendah dibandingkan HLS laki-laki.

Pada tahun 2023, nilai HLS perempuan mencapai 13,27 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa anak perempuan usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 13,27 tahun atau dapat lulus Pendidikan Diploma 1. Berdasarkan data tersebut, diharapkan ke depannya dunia pendidikan Banten akan semakin terbuka bagi kaum perempuan.



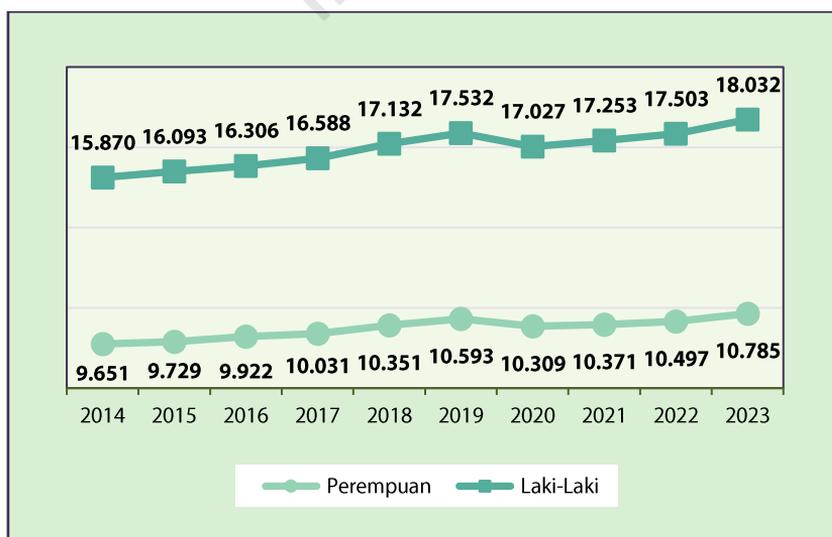
Gambar 3.6

Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (tahun), 2014–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.4 Standar Hidup Layak

Salah satu prioritas pembangunan pemerintah yaitu peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan ini tentunya mencakup seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kondisi kesejahteraan penduduk adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Gambar 3.7

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (ribu rupiah), 2014–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik



Pengeluaran per kapita disesuaikan di Banten selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren positif, sebelum akhirnya pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021, nilai pengeluaran per kapita kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023, nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada laki-laki maupun perempuan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022. Adapun, nilai pengeluaran per kapita disesuaikan perempuan lebih rendah daripada pengeluaran per kapita laki-laki.



3.5 Ketenagakerjaan

Larangan atas segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk diskriminasi gender, sesungguhnya sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di sisi lain, yang seharusnya dipertimbangkan dalam suatu hubungan kerja adalah keterampilan dan dedikasi, bukan jenis kelamin atau bentuk fisik pekerjanya.

Namun demikian, dunia kerja ternyata mampu menciptakan hukum kebiasaan diskriminatif, yang bahkan lebih kuat dan mengikat daripada aturan baku atau undang-undang tertulis. Beberapa perlakuan yang diskriminatif itu, bahkan telah berlangsung lama, sehingga dipandang sebagai suatu hal yang lumrah.

Semua bentuk diskriminasi, jelas mengurangi kesempatan seorang perempuan, yang berpendidikan sekalipun untuk bekerja. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kesesuaian antara besaran gaji dengan tingkat pendidikan, juga menjadi salah satu pertimbangan perempuan dalam menerima tawaran pekerjaan.

Indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tenaga kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berdasarkan Gambar 3.8, TPAK laki-laki tahun 2023 mencapai 82,16 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 46,16 persen. Angka TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan.

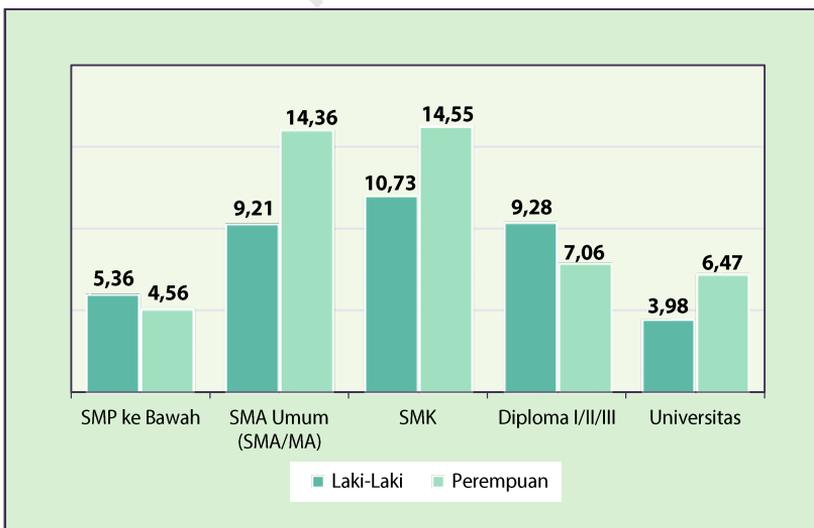


Gambar 3.8

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten (persen), 2020–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2023

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan Gambar 3.9, angka TPT perempuan lulusan Diploma I/II/III lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menjadi penanda bagi berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan. Namun demikian, nilai TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki terutama pada tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu SMA umum, SMK dan Universitas.



Gambar 3.9

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Banten (persen), 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2023

Sementara itu jika dilihat dari upah/gaji yang diterima, rata-rata upah/gaji bersih pekerja perempuan lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Namun demikian, rata-rata upah/gaji bersih pekerja perempuan pada tahun 2023 telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga, kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, yang ditandai oleh meningkatnya rasio upah pekerja perempuan terhadap upah pekerja laki-laki pada tahun 2023 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja per Bulan di Provinsi Banten, 2014–2023

Bulan	Upah (juta rupiah)		Rasio Upah Perempuan Terhadap Laki-laki
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Agustus 2014	2,53	2,10	0,83
Agustus 2015	2,68	2,26	0,85
Agustus 2016	3,76	3,11	0,83
Agustus 2017	4,03	3,16	0,78
Agustus 2018	4,03	3,55	0,88
Agustus 2019	4,04	3,46	0,86
Agustus 2020	3,85	3,38	0,88
Agustus 2021	3,92	3,52	0,90
Agustus 2022	4,67	3,72	0,80
Agustus 2023	4,66	3,79	0,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2014–2023

3.6 Kesempatan dalam Bidang Politik

Keterwakilan perempuan dalam parlemen memiliki arti dan peranan yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Hal ini karena keterwakilannya, bukan karena hanya sekedar menjadi salah satu indikator dalam SDGs, melainkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender itu sendiri.

Kehadiran perempuan di parlemen diharapkan mampu menjadi alat kontrol jalannya roda pemerintahan. Sebagai penerus aspirasi daerah pemilihannya, perempuan diharapkan mampu mendorong terciptanya berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak kepada perempuan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mendukung pemberantasan korupsi, karena perempuan selama ini dipersepsikan sebagai lebih anti korupsi dibandingkan laki-laki.

Terkait jumlahnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 telah menetapkan batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen. Adapun, keterlibatan perempuan di PDRD Banten pada tahun 2023 sebesar 18,82 persen dari jumlah anggota DPRD Banten.

Rendahnya keterwakilan perempuan ini terjadi karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik. Penyebabnya, karena faktor budaya patriarki yang belum memberi ruang luas bagi keterlibatan perempuan di dunia politik. Selain itu, kebanyakan perempuan tidak mandiri secara finansial, padahal aktivitas politik jelas membutuhkan dana yang sangat besar.

BAB 4 Capaian Keberhasilan Pembangunan Gender



Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota, 2023



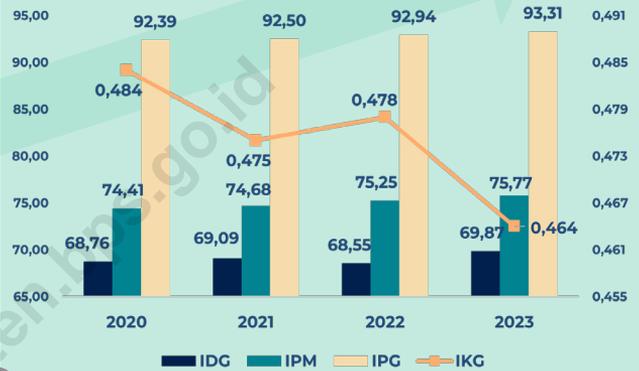
Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota, 2023



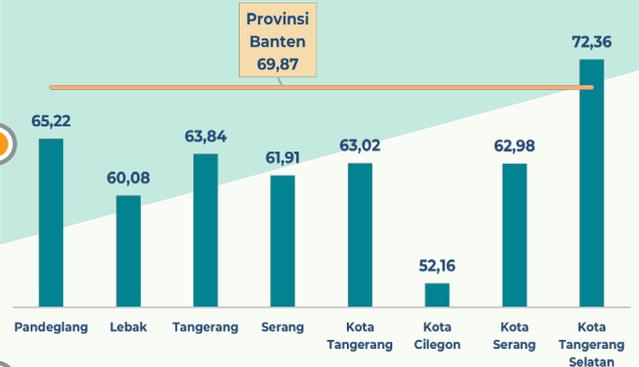
Catatan: Umur Harapan Hidup yang digunakan dalam penghitungan IPM dan IPG adalah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan IPG, IDG, IKG dan IPM di Provinsi Banten, 2020–2023



Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota, 2023



Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2023



Bab 4 Capaian Keberhasilan Pembangunan Gender

Istilah gender sangat terkait dengan paradigma yang berlaku di tengah masyarakat, yaitu perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Pada sebagian negara di dunia termasuk Indonesia yang memiliki budaya patriarki, perbedaan fungsi dan peran ini cukup jelas terlihat. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, baik di lingkungan rumah tangga, dunia kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Konstitusi RI, yaitu Pasal 28 I (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara filosofis, negara telah menjamin untuk memberi perlindungan bagi tiap warga negaranya dari sikap atau tindakan diskriminatif dalam semua hal, termasuk karena perbedaan jenis kelamin.

Jaminan yang diberikan oleh negara ini tidak akan berarti, bila tidak dilaksanakan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah harus dan memang telah menelurkan berbagai regulasi dan aturan, serta kebijakan guna menjamin terselenggaranya perlindungan tersebut. Bukan hanya itu, bahkan pemerintah juga sudah mengadopsi strategi pengarusutamaan gender agar keadilan atau kesetaraan gender dapat terwujud.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender, sesungguhnya dapat dilakukan secara sinergi dalam kerangka mengurangi kemiskinan. Caranya, dengan mempromosikan kesetaraan gender sebagai bagian utama dari strategi pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk kaum perempuan. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat sendiri adalah agar masyarakat mampu mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.



Betapapun juga, guna terwujudnya kesetaraan gender ini, upaya untuk mewujudkannya harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan masyarakat, serta akademisi dan kalangan pengusaha.

4.1 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG), pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV tahun 1995, yang dilaksanakan di Beijing. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender, mulai dipetakan.

PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan, untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan serta program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sementara tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dengan PUG, maka seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan adanya kesempatan dan akses perempuan terhadap program-program pembangunan tersebut. Selain itu, harus ada kendali dan manfaat untuk perempuan.

Di Banten, PUG secara resmi diadopsi menjadi strategi pembangunan daerah bidang pemberdayaan perempuan. Pengadopsiannya dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Disusul kemudian dengan Instruksi Gubernur Banten No. 2 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah serta Peraturan Gubernur Banten No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender. Terakhir, adalah Keputusan Gubernur Banten No. 401.05/Kep.332-uk/2009 tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten.

Semua regulasi PUG di atas diberlakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Banten sendiri pada saat itu, menjadi provinsi yang pertama dalam hal menindaklanjuti instruksi presiden ini.

4.2 Perkembangan Capaian Pembangunan Gender

Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah kesetaraan gender. Isu ini tercantum dalam tujuan kelima SDGs yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Banten terkait pengarusutamaan gender ditujukan agar perempuan di Banten memiliki peran yang lebih besar khususnya dalam pembangunan. Semakin meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan setidaknya terlihat dari angka IPG yang terus mengalami peningkatan. Adapun besaran IPG nya pada tahun 2023 mencapai 93,31 atau meningkat 0,37 poin dibandingkan tahun 2022 (Gambar 4.1).

Gambar 4.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, 2020–2023

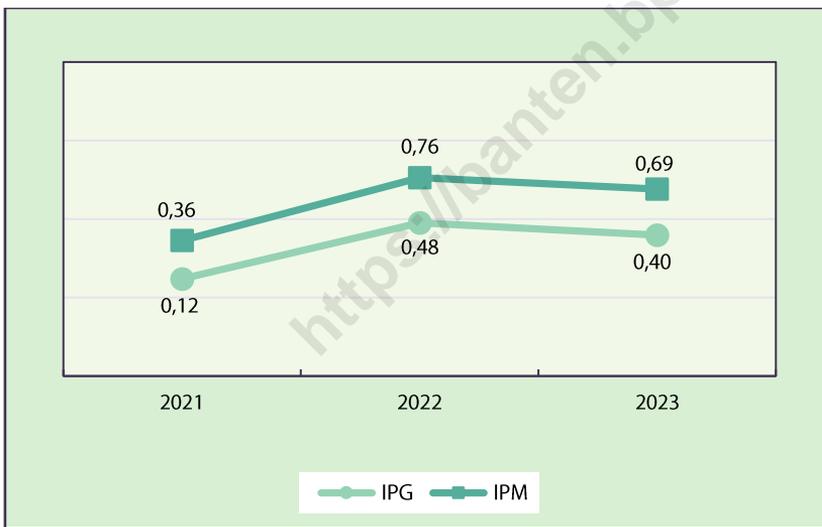


Catatan: Umur Harapan Hidup yang digunakan dalam penghitungan IPG dan IPM tahun 2020–2023 adalah hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 4.1, diperoleh pula informasi bahwa peningkatan IPG ini terjadi seiring dengan meningkatnya angka IPM. Berarti, perbedaan perlakuan terhadap perempuan, cenderung menurun dengan meningkatnya capaian pembangunan manusia. Dengan kata lain, penghargaan atau pengakuan terhadap perempuan dan kapabilitasnya, semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi bukti bahwa program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Banten, dilakukan dengan berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender.

Sementara itu, kecepatan peningkatan IPG secara umum lebih rendah dari IPM, menjadi penanda bahwa akselerasi dari peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan berjalan lebih lambat daripada laki-laki (Gambar 4.2).



Gambar 4.2

Perkembangan Kecepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten (persen), 2021–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.3 Perkembangan Capaian Pemberdayaan Gender

Peningkatan kualitas hidup, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, seharusnya bisa lebih memperkuat upaya pemberdayaan perempuan. Hal ini karena meningkatnya kualitas hidup, akan menghasilkan kesetaraan gender yang menempatkan perempuan berdiri sejajar dengan laki-laki. Kesejajaran inilah yang

diharapkan dapat menghapus berbagai budaya yang menghambat perempuan dalam memberdayakan diri.

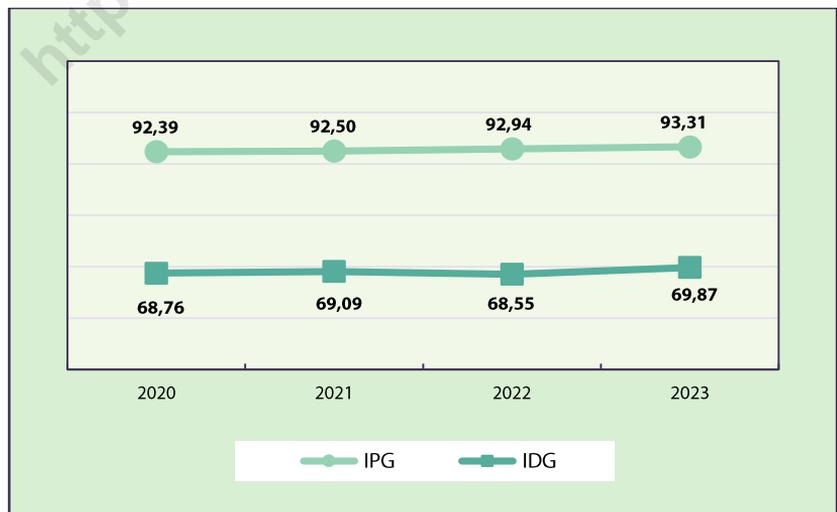
Untuk mengukur capaian atau tingkat pemberdayaan perempuan di suatu wilayah digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan ini mencakup partisipasi politik, partisipasi dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan.

Sementara indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi politik adalah keterwakilan perempuan dalam parlemen. Partisipasi dalam bidang ekonomi, dilihat dari sumbangan perempuan dalam pendapatan. Adapun pengambilan keputusan, dinyatakan dengan jabatan perempuan dalam pekerjaan profesional, yaitu sebagai tenaga profesional dan teknisi, manajer dan tenaga administrasi.

Angka IDG mempunyai rentang nilai dari 0 sampai dengan 100. Nilai 0, mempunyai makna bahwa kaum perempuan tidak memiliki peran dalam kehidupan ekonomi dan politik, alias sama sekali tidak diberdayakan. Sementara nilai 100 diberikan bila perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki, atau perempuan dan laki-laki sama-sama diberdayakan.

Gambar 4.3

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Banten, 2020–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dengan melihat Gambar 4.3, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan atau peranan perempuan Banten dalam kehidupan ekonomi dan politik, masih jauh dari kondisi ideal. Namun demikian, peranannya secara umum telah meningkat, seiring dengan bertambahnya kapabilitas dasar mereka.

4.4 Perkembangan Capaian Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dipandang bukan hanya sekedar pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia. Namun lebih daripada itu, kesetaraan gender merupakan suatu pilar penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kesetaraan gender menggambarkan suatu kondisi perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan.

Kesetaraan gender diukur dengan mengadaptasi ukuran ketimpangan gender dari UNDP yang kemudian diperkenalkan sebagai Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG mengevaluasi ketidaksetaraan gender pada tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.



Gambar 4.4

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Banten, 2020–2023

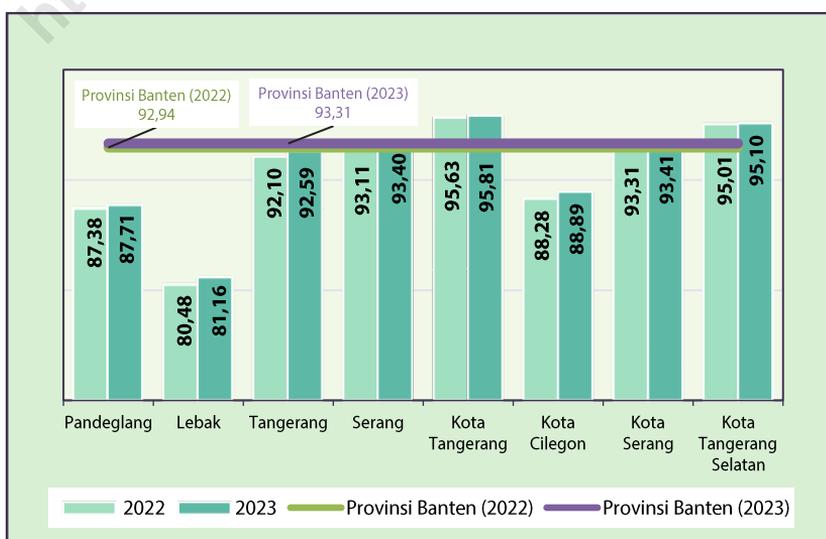
Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Banten selama empat tahun terakhir mengalami penurunan (Gambar 4.4). Sejak tahun 2020 hingga 2023, IKG berkurang sebesar 0,020 poin atau rata-rata turun 0,005 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

4.5 Capaian Pembangunan Gender Kabupaten/Kota

Semua kabupaten/kota di Banten mempunyai semangat yang sama dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Kondisi yang demikian dapat diketahui dari adanya regulasi PUG, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun instruksi bupati/walikota, yang dikeluarkan oleh semua kabupaten/kota.

Adapun, capaian pembangunan gender tercermin dari indeks pembangunan gender (IPG). Pada tahun 2023, IPG Banten berada pada angka 93,31. Pada level Kabupaten/Kota, nilai IPG tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang sebesar 95,81 diikuti oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 95,10, sedangkan IPG terendah ada di Kabupaten Lebak sebesar 81,16. Namun demikian, secara keseluruhan masih terdapat empat kabupaten/kota yang berada di bawah nilai IPG Banten (Gambar 4.5).

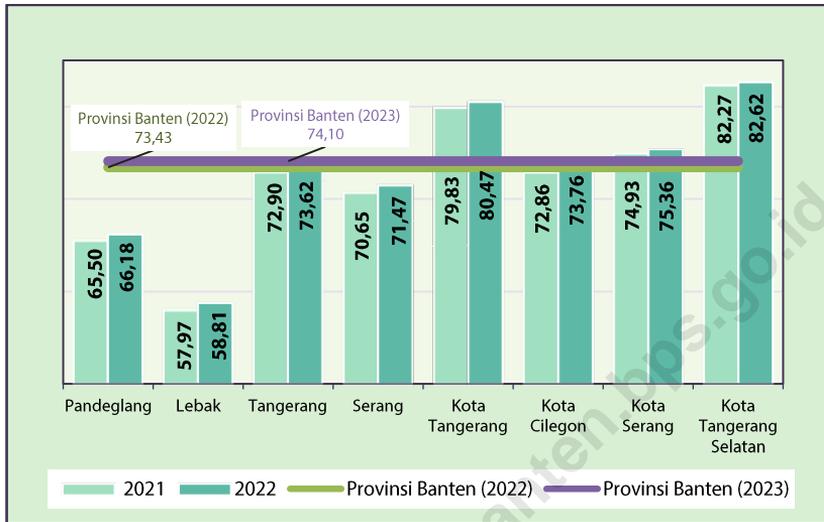


Gambar 4.5

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, IPM perempuan tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 82,62 diikuti oleh Kota Tangerang sebesar 80,47. Adapun IPM perempuan terendah ada di Kabupaten lebak mencapai 58,81. Dapat dikatakan bahwa pembangunan gender di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Banten (Gambar 4.6).



Gambar 4.6

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023

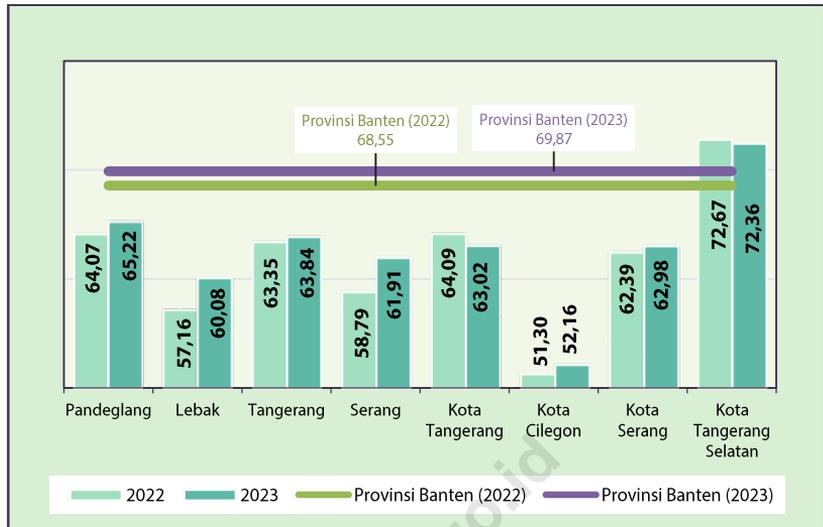
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi capaian indikator, seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Banten telah mengalami peningkatan angka IPG. Dimana, peningkatannya ini terjadi seiring dengan meningkatnya angka IPM perempuan (Gambar 4.6). Dengan demikian, program pembangunan yang telah dilaksanakan di Banten selama tahun 2023, secara umum dapat dikatakan sudah cukup berpihak kepada perempuan.

Pada tahun 2023, peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di sebagian besar kabupaten/kota mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat dua kabupaten/kota yang mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Meskipun mengalami penurunan, Kota Tangerang Selatan masih menjadi wilayah dengan nilai IPG tertinggi di Provinsi Banten pada tahun 2023 (Gambar 4.7).

Gambar 4.7

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023

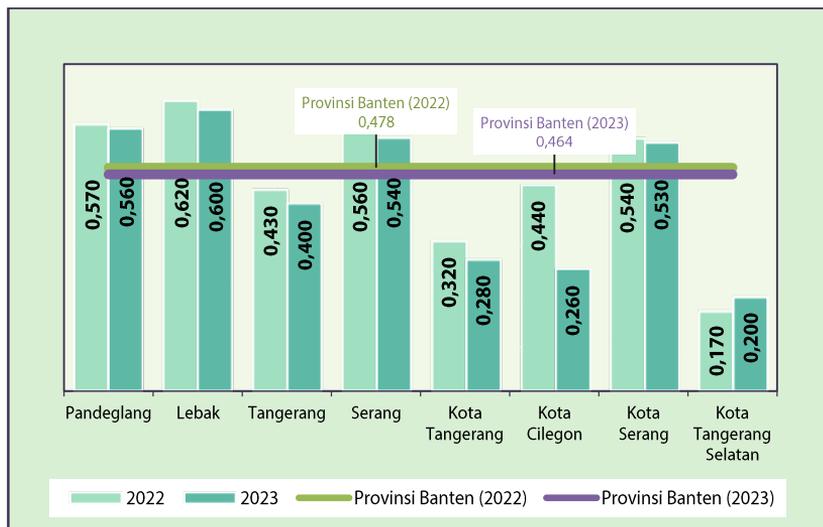


Sumber: Badan Pusat Statistik

Ketimpangan gender pada sebagian besar wilayah di Provinsi Banten menunjukkan penurunan selama tahun 2022–2023, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.8. Ketimpangan gender terendah pada tahun 2023 yaitu di Kota Tangerang Selatan yaitu dengan nilai 0,20, disusul dengan Kota Cilegon dan Kota Tangerang dengan nilai masing-masing yaitu 0,26 dan 0,28. Terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki nilai IKG lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten baik pada tahun 2022 dan 2023. Kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

Gambar 4.8

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

4.6 Tipologi Klassen IPM, IPG, IDG dan IKG Kabupaten/Kota

Hubungan searah yang terjadi antara angka IPM dan IPG menghasilkan interpretasi bahwa daerah dengan IPM tinggi akan memiliki angka IPG yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Namun demikian, hal ini tidak berlaku bila antara laki-laki dan perempuan terjadi perbedaan perlakuan yang cukup besar dalam peningkatan kapabilitas atau pembangunan manusia.

Di sisi lain, tiadanya perbedaan perlakuan dalam pembangunan manusia, akan meningkatkan kapabilitas perempuan, hingga mampu berdiri sejajar bersama laki-laki. Kondisi ini dapat meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dengan demikian, wilayah dengan IPG tinggi seharusnya akan memiliki angka IDG yang tinggi pula.

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hubungan antara angka IPM, IPG, IDG dan IKG di Banten, setidaknya diperlukan analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen ini dilakukan dengan membagi kabupaten/kota sesuai dengan posisi capaian IPM, IPG IDG dan IKG, yang dilihat dari rata-rata Banten. Dalam Tipologi Klassen, kabupaten/kota dikelompokkan dalam empat kuadran dengan sebagai berikut:

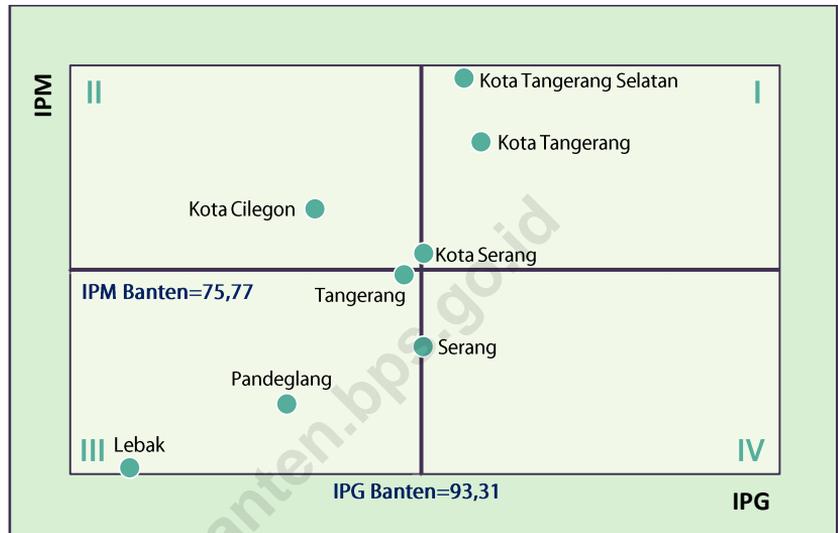
- Kuadran I : Kabupaten/kota dengan IPM/IDG/IKG dan IPG di atas angka Banten
- Kuadran II : Kabupaten/kota dengan IPM/IDG/IKG di atas angka Banten, tetapi IPG nya di bawah angka Banten
- Kuadran III : Kabupaten/kota dengan IPM/IDG/IKG dan IPG di bawah angka Banten
- Kuadran IV : Kabupaten/kota dengan kondisi IPM/IDG/IKG di bawah angka Banten, tetapi IPG nya di atas angka Banten

Berdasarkan Tipologi Klassen yang disajikan pada Gambar 4.9, secara umum terlihat ada hubungan yang searah atau positif antara IPM dengan IPG. Dalam hal ini, kabupaten/kota dengan angka IPG di atas IPG Banten mempunyai angka IPM yang tinggi pula (di atas

IPM Banten), yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang (Kuadran I). Demikian pula sebaliknya, kabupaten/kota dengan angka IPG rendah (di bawah IPG Banten) mempunyai angka IPM yang rendah pula (di bawah IPM Banten), yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang (Kuadran III).

Gambar 4.9

Tipologi Klassen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Hanya saja, ada anomali untuk Kota Cilegon yang memiliki angka IPM di atas Banten, tapi angka IPG nya justru di bawah Banten (Kuadran II). Selain itu, ada pula Kabupaten Serang yang mempunyai angka IPG melebihi IPG Banten, namun IPM nya justru berada lebih rendah dari angka IPM Banten (Kuadran IV). Kemungkinan besar, anomali ini dipengaruhi oleh kondisi atau struktur ekonomi ketiga wilayah masing-masing.

Adapun tipologi Klassen yang disajikan pada Gambar 4.10, terlihat bahwa sebanyak empat kabupaten/kota dengan angka IPG di bawah Banten, juga memiliki angka IDG di bawah Banten (Kuadran III). Begitu juga, sebanyak tiga Kabupaten/Kota yang mempunyai angka IPG di atas Banten, ternyata memiliki angka IDG di bawah Banten (Kuadran IV). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara IPG dan IDG untuk level kabupaten/kota di Banten.

Sementara itu dengan memperhatikan posisinya yang selalu berada pada Kuadran I (Gambar 4.9 dan Gambar 4.10), dapat dikatakan bahwa peningkatan kapabilitas atau pembangunan manusia yang tinggi di Kota Tangerang Selatan tidak hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan. Bukan hanya itu, peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politiknya, juga meningkat seiring dengan bertambahnya kapabilitas mereka. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara pembangunan manusia dengan pemberdayaan gender.



Gambar 4.10

Tipologi Kelas Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.11 menunjukkan tipologi kelas antara IKG dan IPG. Terlihat bahwa terdapat dua kabupaten dengan angka IPG di atas Banten dan angka IKG di bawah Banten (kuadran 4) yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Sedangkan wilayah dengan IKG di atas Banten dan IPG di bawah Banten (Kuadran II) yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara IPG dan IKG untuk level kabupaten/kota di Banten.

Gambar 4.11
 Tipologi Klassen
 Indeks Ketimpangan
 Gender (IKG) dan
 Indeks Pembangunan
 Gender (IPG)
 Kabupaten/Kota
 di Provinsi Banten,
 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB 5

Kesimpulan



Bab 5 Kesimpulan

- Kondisi kesehatan perempuan Banten lebih baik dari laki-laki, yang ditandai oleh lebih besarnya umur harapan hidup (UHH) penduduk perempuan. Lama hidup perempuan secara rata-rata lebih panjang lima tahun dibandingkan laki-laki.
- Pemenuhan hak atas pendidikan di Banten sudah mulai setara. Kondisi ini ditandai oleh rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas semakin meningkat. Begitu juga, perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan yang mengecil. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang.
- Pada masa mendatang, dunia pendidikan Banten akan semakin terbuka bagi kaum perempuan. Hal ini setidaknya terlihat dari angka partisipasi sekolah (APS) kelompok usia 16-18 tahun dan usia 19-24 tahun penduduk perempuan, yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, harapan lama sekolah (HLS) penduduk perempuan usia 7 tahun terus meningkat, bahkan sudah berada di atas HLS laki-laki.
- Kesempatan perempuan dalam bidang pekerjaan mulai membaik. Kondisi ini setidaknya berlaku untuk wanita lulusan Diploma I/II/III. Bahkan, rendahnya angka TPT perempuan lulusan Diploma I/II/III dibandingkan laki-laki, juga dapat menjadi penanda bagi berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan.
- Rata-rata upah/gaji bersih pekerja perempuan pada tahun 2023 telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, yang ditandai oleh meningkatnya rasio upah pekerja perempuan terhadap upah pekerja laki-laki.

- Keterwakilan perempuan Banten di parlemen tahun 2023 hanya 18,85 persen dari jumlah anggota DPRD Banten. Angka persentase ini masih jauh di bawah batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen sesuai amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.
- IPG Banten meningkat seiring dengan meningkatnya IPM. Berarti, perbedaan perlakuan terhadap perempuan menurun seiring dengan meningkatnya capaian pembangunan manusia. Dengan kata lain, penghargaan atau pengakuan terhadap peran perempuan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- Masih ada kesenjangan dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan Banten. Hal ini terlihat dari angka IPG yang masih kurang dari 100. Selain itu, peningkatan kapabilitas dasar perempuannya juga berjalan lebih lambat daripada laki-laki.
- Pada level Kabupaten/Kota, nilai IPG tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang sebesar 95,81 diikuti oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 95,10, sedangkan IPG terendah ada di Kabupaten Lebak sebesar 81,16. Namun demikian, secara keseluruhan masih terdapat 4 kabupaten/kota yang berada di bawah nilai IPG Banten.

DP Daftar Pustaka

BPS. 2023. Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Maret 2023. BPS: Jakarta.

BPS. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023. BPS: Jakarta

BPS. 2024. Indeks Pembangunan Manusia 2023. BPS: Jakarta

BPS Provinsi Banten. 2024. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2023. BPS Provinsi Banten: Kota Serang

Hanna. 2014. Retrieved from Cekaja.com (12 November 2014): <https://www.cekaja.com/info/5-alasan-wanita-lebih-panjang-umur-dibanding-pria/>

LAMPIRAN



Lampiran

Lampiran 1

Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
Menurut
Komponen
di Provinsi Banten,
2020–2023

Tahun	UHH (tahun)		HLS (tahun)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	71,73	76,63	12,89	12,99
2021	71,77	76,69	12,90	13,16
2022	71,95	77,09	12,92	13,23
2023	72,16	77,51	12,93	13,27

**Lanjutan
Lampiran 1**

Tahun	RLS (tahun)		Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
2020	9,33	8,45	17.027	10.309
2021	9,37	8,46	17.253	10.371
2022	9,48	8,72	17.503	10.497
2023	9,49	8,85	18.032	10.785

<https://banten.bps.go.id>

**Lanjutan
Lampiran 1**

Tahun	IPM		IPG
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(10)	(11)	(12)
2020	78,42	72,45	92,39
2021	78,63	72,73	92,50
2022	79,01	73,43	92,94
2023	79,41	74,10	93,31

Catatan:

UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil *Long Form* SP2020 (LF SP2020)

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (UHH LF SP2020)

IPG : Indeks Pembangunan Gender (UHH LF SP2020)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 2

Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
Menurut
Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten,
2020–2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pandeglang	86,99	87,18	87,38	87,71
2. Lebak	79,93	80,04	80,48	81,16
3. Tangerang	91,74	91,88	92,10	92,59
4. Serang	92,71	92,63	93,11	93,40
5. Kota Tangerang	95,97	95,61	95,63	95,81
6. Kota Cilegon	87,88	87,90	88,28	88,89
7. Kota Serang	92,94	93,14	93,31	93,41
8. Kota Tangerang Selatan	94,58	94,82	95,01	95,10
Provinsi Banten	92,39	92,50	92,94	93,31

Catatan: Umur Harapan Hidup yang digunakan dalam penghitungan IPG tahun 2020–2023 adalah hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022–2023	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)			
		Laki-Laki		Perempuan	
		2022	2023	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pandeglang	71,42	71,66	75,96	76,48	
2. Lebak	71,28	71,52	75,68	76,18	
3. Tangerang	72,27	72,50	77,68	78,00	
4. Serang	71,80	72,06	76,76	77,31	
5. Kota Tangerang	72,36	72,59	77,81	78,14	
6. Kota Cilegon	71,99	72,20	77,16	77,57	
7. Kota Serang	72,22	72,45	77,60	77,94	
8. Kota Tangerang Selatan	72,67	72,88	78,25	78,55	
Provinsi Banten	71,95	72,16	77,09	77,51	

Lanjutan
Lampiran 3

Kabupaten/Kota	HLS (tahun)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pandeglang	13,49	13,50	14,13	14,14
2. Lebak	12,15	12,17	12,07	12,08
3. Tangerang	12,86	12,87	12,82	12,86
4. Serang	12,66	12,81	13,14	13,19
5. Kota Tangerang	13,87	13,88	13,89	13,95
6. Kota Cilegon	13,19	13,20	14,69	14,70
7. Kota Serang	12,94	12,95	12,81	12,82
8. Kota Tangerang Selatan	14,49	14,50	14,81	14,82
Provinsi Banten	12,92	12,93	13,23	13,27

**Lanjutan
Lampiran 3**

Kabupaten/Kota	RLS (tahun)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Pandeglang	7,62	7,64	6,64	6,68
2. Lebak	7,06	7,07	6,09	6,26
3. Tangerang	9,31	9,32	8,28	8,56
4. Serang	8,24	8,25	7,29	7,41
5. Kota Tangerang	11,23	11,30	10,43	10,53
6. Kota Cilegon	10,67	10,68	9,77	10,05
7. Kota Serang	9,57	9,58	8,49	8,50
8. Kota Tangerang Selatan	12,11	12,12	11,23	11,28
Provinsi Banten	9,48	9,49	8,72	8,85

**Lanjutan
Lampiran 3**

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
1. Pandeglang	14.164	14.675	6.225	6.444
2. Lebak	13.305	13.711	4.286	4.429
3. Tangerang	18.029	18.483	10.701	10.886
4. Serang	15.493	16.055	9.792	10.143
5. Kota Tangerang	19.619	20.270	14.514	14.954
6. Kota Cilegon	21.050	21.799	7.837	8.107
7. Kota Serang	19.579	20.106	12.798	13.138
8. Kota Tangerang Selatan	22.464	22.860	15.051	15.249
Provinsi Banten	17.503	18.032	10.497	10.785

**Lanjutan
Lampiran 3**

Kabupaten/Kota	IPM			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. Pandeglang	74,96	75,45	65,50	66,18
2. Lebak	72,03	72,46	57,97	58,81
3. Tangerang	79,15	79,51	72,90	73,62
4. Serang	75,88	76,52	70,65	71,47
5. Kota Tangerang	83,48	83,99	79,83	80,47
6. Kota Cilegon	82,53	82,98	72,86	73,76
7. Kota Serang	80,30	80,68	74,93	75,36
8. Kota Tangerang Selatan	86,59	86,88	82,27	82,62
Provinsi Banten	79,01	79,41	73,43	74,10

Catatan:

UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil *Long Form* SP2020 (LF SP2020)

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (UHH LF SP2020)

IPG : Indeks Pembangunan Gender (UHH LF SP2020)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 4

Indek
Pemberdayaan
Gender (IDG)
Menurut
Komponen
di Provinsi Banten,
2020–2023

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	17,65	43,97	31,74	68,76
2021	17,65	45,72	31,95	69,09
2022	17,65	42,25	31,71	68,55
2023	18,82	43,21	32,14	69,87

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 5

Indek
Pemberdayaan
Gender (IDG)
Menurut
Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten,
2020–2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pandeglang	63,52	63,16	64,07	65,22
2. Lebak	58,68	58,24	57,16	60,08
3. Tangerang	61,53	62,17	63,35	63,84
4. Serang	59,48	59,93	58,79	61,91
5. Kota Tangerang	65,03	64,86	64,09	63,02
6. Kota Cilegon	52,32	52,81	51,3	52,16
7. Kota Serang	61,26	61,66	62,39	62,98
8. Kota Tangerang Selatan	73,85	73,08	72,67	72,36
Provinsi Banten	68,76	69,09	68,55	69,87

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 6

Indek
Pemberdayaan
Gender (IDG)
Menurut
Komponen dan
Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten,
2022–2023

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)		Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (persen)		Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pandeglang	14,00	14,29	45,40	45,96	29,69	30,36
2. Lebak	8,00	8,00	36,26	48,61	31,22	32,03
3. Tangerang	14,00	14,00	44,24	44,12	28,30	28,74
4. Serang	12,00	14,00	38,40	41,71	26,81	27,65
5. Kota Tangerang	12,00	12,00	41,38	40,40	32,00	31,98
6. Kota Cilegon	10,00	10,00	41,10	42,39	20,67	20,73
7. Kota Serang	13,33	13,33	46,19	47,76	27,66	28,31
8. Kota Tangerang Selatan	30,00	30,00	41,39	43,10	26,36	26,35
Provinsi Banten	17,65	18,82	42,25	43,21	31,71	32,14

Lampiran 7

Indek
Ketimpangan
Gender (IKG)
Menurut
Komponen
di Provinsi Banten,
2020–2023

Tahun	MTF	MHPK20
(1)	(2)	(3)
2020	0,139	0,269
2021	0,132	0,254
2022	0,137	0,261
2023	0,119	0,254

**Lanjutan
Lampiran 7**

Tahun	Keterlibatan di Legislatif (persen)		Pendidikan SMA ke Atas (persen)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
2020	82,35	17,65	46,57	37,26
2021	82,35	17,65	46,65	36,88
2022	82,35	17,65	47,38	40,14
2023	81,18	18,82	45,93	39,73

<https://banten.bps.go.id>

**Lanjutan
Lampiran 7**

Tahun	TPAK (persen)		IKG
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(8)	(9)	(10)
2020	81,70	46,62	0,484
2021	80,16	46,84	0,475
2022	81,69	47,17	0,478
2023	82,16	46,16	0,464

Catatan:

MTF : Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan

MHPK20: Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

IKG : Indeks Ketimpangan Gender

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 8

Indek
Ketimpangan
Gender (IKG)
Menurut
Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten,
2020–2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pandeglang	0,580	0,583	0,573	0,561
2. Lebak	0,605	0,626	0,616	0,600
3. Tangerang	0,486	0,457	0,433	0,402
4. Serang	0,563	0,554	0,560	0,544
5. Kota Tangerang	0,279	0,311	0,324	0,284
6. Kota Cilegon	0,338	0,354	0,443	0,260
7. Kota Serang	0,508	0,521	0,544	0,530
8. Kota Tangerang Selatan	0,171	0,155	0,170	0,200
Provinsi Banten	0,484	0,475	0,478	0,464

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 9

Indek
Ketimpangan
Gender (IKG)
Menurut
Komponen dan
Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten,
2022–2023

Kabupaten/Kota	MTF		MHPK20	
	2022	2023	2022	2023
	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pandeglang	0,280	0,255	0,402	0,365
2. Lebak	0,326	0,283	0,426	0,397
3. Tangerang	0,064	0,040	0,245	0,251
4. Serang	0,275	0,268	0,311	0,278
5. Kota Tangerang	0,021	0,011	0,154	0,170
6. Kota Cilegon	0,071	0,005	0,191	0,188
7. Kota Serang	0,319	0,288	0,277	0,239
8. Kota Tangerang Selatan	~0	0,007	0,172	0,179
Provinsi Banten	0,137	0,119	0,261	0,254

**Lanjutan
Lampiran 9**

Kabupaten/Kota	Keterwakilan di Legislatif (persen)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pandeglang	86,00	85,71	14,00	14,29
2. Lebak	92,00	92,00	8,00	8,00
3. Tangerang	86,00	86,00	14,00	14,00
4. Serang	88,00	86,00	12,00	14,00
5. Kota Tangerang	88,00	88,00	12,00	12,00
6. Kota Cilegon	90,00	90,00	10,00	10,00
7. Kota Serang	86,67	86,67	13,33	13,33
8. Kota Tangerang Selatan	70,00	70,00	30,00	30,00
Provinsi Banten	82,35	81,18	17,65	18,82

**Lanjutan
Lampiran 9**

Kabupaten/Kota	Pendidikan SMA ke Atas (persen)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Pandeglang	21,68	22,14	19,21	17,01
2. Lebak	19,86	17,37	12,13	11,72
3. Tangerang	49,19	45,64	38,32	39,01
4. Serang	31,05	28,96	24,07	24,13
5. Kota Tangerang	65,03	66,33	58,00	56,81
6. Kota Cilegon	61,50	60,54	52,56	52,02
7. Kota Serang	35,89	36,27	32,49	32,24
8. Kota Tangerang Selatan	70,91	69,76	64,52	62,91
Provinsi Banten	47,38	45,93	40,14	39,73

Lanjutan
Lampiran 9

Kabupaten/Kota	Keterwakilan di Legislatif (persen)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
1. Pandeglang	81,85	77,78	40,80	41,92
2. Lebak	82,32	84,73	49,31	50,06
3. Tangerang	83,06	85,07	50,33	47,98
4. Serang	81,51	81,52	46,76	44,15
5. Kota Tangerang	83,57	79,92	47,90	46,70
6. Kota Cilegon	85,31	82,76	48,67	42,22
7. Kota Serang	79,65	84,56	49,25	51,65
8. Kota Tangerang Selatan	75,76	79,16	41,49	42,15
Provinsi Banten	81,69	82,16	47,17	46,16

Catatan:

MTF : Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan

MHPK20: Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

IKG : Indeks Ketimpangan Gender

Sumber: Badan Pusat Statistik

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kav. H1-2
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang - Banten 42171
Telepon (0254) 267027, Faks. (0254) 267026,
Email bps3600@bps.go.id, Website <https://banten.bps.go.id>

ISSN 2715-1492

